



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) RI atau yang mewakili berdasarkan surat Presiden No: R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	73 (Tujuh Puluh Tiga)
Hari/Tanggal	:	Senin, 23 Oktober 2017
W a k t u	:	Pukul 13.15 s.d 14.40 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN); didampingi oleh: 1. Bowo Sidik Pangarso, SE. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG); 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD); 3. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Hanura) 4. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra);
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	1. Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Tahun 2018 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI. 2. PMN sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI; 3. Dividen sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir	:	1. 28 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri BUMN atau yang mewakili beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI atau yang mewakili berdasarkan surat Presiden No: R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017, dibuka pada pukul 13.15 WIB dan rapat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini Senin, 23 Oktober 2017 dalam rangka: Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2018, sebagai bahan Penyempurnaan RKA K/L di komisi dengan mitra kerjanya dan meminta agar hasil penyempurnaan RKA K/L disampaikan kepada Badan Anggaran sebagai bahan akhir penetapan.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN RI menjelaskan mengenai RKA Kementerian Perindustrian TA 2018 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Menteri BUMN RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar **Rp247.041.755.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*). Adapun rincian alokasi anggaran per program sebagai berikut:
 - 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp 186.184.970.000,-
 - 2) Pembinaan BUMN Rp 60.856.785.000,-
2. Komisi VI DPR RI menyetujui Target Setoran Dividen BUMN pada APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp44,695.000.000.000,- (*Empat Puluh Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah*) sesuai dengan hasil Rapat Badan Anggaran DPR RI tanggal 19 September 2017.
3. Komisi VI DPR RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-463/MBU/08/2017 sebesar Rp3.600.000.000.000,- (*Tiga Triliun Enam Ratus Miliar Rupiah*) untuk mendukung pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian Light Rail Transit (LRT) terintegrasi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) yang merupakan penugasan Pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Selanjutnya ketetapan Komisi VI DPR RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk bahan akhir penetapan RUU APBN Tahun Anggaran 2018.

Catatan:

- 1) Komisi VI DPR RI menyarankan kepada Pemerintah melalui Kementerian BUMN RI untuk mengusulkan PMN kembali dalam pembahasan APBN berikutnya.

- 2) Fraksi Partai Gerindra belum dapat menyatakan pendapat dalam pembahasan RKA Kementerian/Lembaga TA 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.40 WIB.